

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	1
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Media :	Radar Sampit	Halaman :	09
Kompas	Kalteng Pos ✓	Borneo News	
Palangka Post	Tabengan		

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Jaga Terus Akuntabilitas Keuangan

PALANGKA RAYA, PPOST
Wakil Gubernur Provinsi
Kalimantan Tengah (Kalteng)

Edy Pratowo mengikuti rapat
kerja nasional (Rakernas)
Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Pemerintah Tahun
2021 secara virtual, Selasa
(14/9) lalu.

Edy menjelaskan, dalam paparannya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah pusat dan daerah akan terus menjaga akuntabilitas keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19 dengan melibatkan para penegak hukum.

"Pemerintah bekerja keras menggunakan instrument APBN untuk meringankan dan memulihkan ekonomi. Kita menggunakan resources ini harus dipertanggungjawabkan," katanya.

Edy mengungkapkan, penegak hukum yang bersinergi dengan pemerintah dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara ini, meliputi Kepolisian, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dengan melibatkan penegak hukum, maka akan menghindari potensi terjadinya risiko penyelewengan terhadap uang negara yang pada akhirnya mengurangi efektivitas program pemerintah.

"Kami memahami akan terjadi adanya risiko penggunaan uang negara, sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan melibatkan lembaga penegak hukum," pungkasnya.

Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan pemberian penghargaan terhadap daerah yang meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2020 dari BPK RI. Provinsi Kalimantan Tengah berhasil mendapatkan opini WTP minimal 5 kali berturut-turut sejak tahun 2016 sd 2020. (ans/P5)